



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2021**

**KEMANTREN NGAMPILAN
KOTA YOGYAKARTA
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses dalam rangka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan menuju kondisi yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumber daya yang dimiliki dengan tetap menjaga kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik.

Amanat dari Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Renja Kemantren Ngampilan Tahun 2021 disusun dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan ke kecamatan. Perumusan Renja mengakomodir usulan masyarakat melalui program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

Renja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Tahun 2021 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja di harapkan dapat menjadi acuan

untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2021.

Pada tahun 2021 kelembaggan kecamatan Ngampilan akan berubah menjadi kemantren Ngampilan. Demikian pula struktur organisasi, program dan kegiatan akan mengalami beberapa perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipakai dalam menyusun Rencana Kerja OPD Kemantren Ngampilan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- o. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- p. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
- q. Perwal No 58 Tahun 2018 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- r. Perwal No 59 Tahun 2018 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- s. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- t. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Tahun 2021 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota

Yogyakarta tahun 2021 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemantren Ngampilan.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Tahun 2021 ini adalah:

1. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output tahun 2021 sehingga dapat memberikan gambaran terhadap kinerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki;
2. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah;
3. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi sehingga Kinerja instansi dapat efektif, berkelanjutan dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Kemantren Ngampilan Tahun 2021 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III PRIORITAS , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngampilan tahun 2019 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Seluruh Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2019 dibiayai dengan APBD Kota Yogyakarta, oleh karena itu dalam pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngampilan mengacu pada program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tertuang pada DPA/DPPA Kecamatan Ngampilan Tahun 2019.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tingkat Capaian Program Kegiatan Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II.1

Realisasi Tahun 2019 dibandingkan Target capaian Tahun 2019

No	Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Kinerja Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	646.835.000,00	623.248.664,55	96,35

2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Peningkatan Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	349.630.000,00	340.507.856,00	97,39
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD	Peningkatan Kinerja dan kelancaran Administrasi Keuangan dan Pelaporan	11.516.000,00	11.366.000,00	98,70
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Ngampilan	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik	2.184.518.000,00	2.051.026.036,55	93,89
Total Belanja Langsung			3.192.499.000,00	3.026.148.664,55	94,79

Catatan : Anggaran adalah anggaran per sasaran PD

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi.

Berdasarkan uraian evaluasi kinerja di atas, analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran program dan kegiatan di Kecamatan Ngampilan dapat dilihat dalam Tabel II.2 sebagai berikut:

Tabel II.2
Capaian Target Program dan Kegiatan Tahun 2019

No.	Nama Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	70.263.000,00	70.254.000,00	99,99

		2. Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	576.572.000,00	552.994.772,00	95,91
II	Peningkatan sarana dan Aparatur	1. Peliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	297.340.000,00	290.258.156,00	97,61
		2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	52.290.000,00	50.249.700,00	96,10
III	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	11.516.000,00	11.366.000,00	98,70
IV	Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ngampilan	119.556.000,00	82.683.000,00	69,16
		2. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Ngampilan	51.750.000,00	51.237.697,00	99,01
		3. Pembinaan Sosial dan Budaya Kecamatan Ngampilan	220.627.000,00	210.791.000,00	95,54
		4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Ngampilan	527.422.000,00	519.963.117,00	98,59
		5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Notoprajan	553.922.000,00	536.586.900,00	96,87
		6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Pembinaan Perekonomian masyarakat Kecamatan Ngampilan	711.241.000,00	649.764.322,55	91,36

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kecamatan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja

Utama atau Sasaran Strategis Kecamatan Ngampilan adalah: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan Meningkat.

Indikator Sasaran Kecamatan Ngampilan Tahun 2019 adalah : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan dengan Target Sasaran Kecamatan Ngampilan adalah : 389

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian IKU secara ringkas ditunjukkan oleh tabel II.3 berikut ini:

Tabel II.3
Pencapaian IKU Kecamatan Ngampilan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran OPD	Target				Realisasi		
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019
Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan Meningkat	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Ngampilan	350	388,5	389	389	388,5	388,5	389

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2019, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Maka pencapaian IKU Kecamatan Ngampilan Tahun 2019 mencapai 100% dalam kategori Sangat Berhasil. Nilai tersebut merupakan hasil dari evaluasi diri yang dilakukan oleh kelurahan-kelurahan. Evaluasi Kelurahan merupakan salah satu parameter penilaian kelurahan yang meliputi beberapa bidang yaitu :

1. Pemerintahan Umum
2. Kemasyarakatan
3. Kewilayahan

Variabel penilaian dari ketiga bidang tersebut telah mampu merepresentasikan kondisi kelurahan secara makro sehingga dari hasil penilaian di tingkat kelurahan tersebut akan dapat menentukan tingkat kemajuan perkembangan kelurahan dan kecamatan secara umum.

Sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat. Telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 5,21%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui penghematan dari belanja penggandaan dan belanja jamuan makan minum rapat serta sisa kontrak hasil negosiasi harga.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngampilan

Dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ngampilan yang sebagian besar anggaran digunakan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Kecamatan yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk anggaran pemeliharaan lingkungan dilaksanakan untuk meningkatkan kelayakan lingkungan yang nyaman dan layak huni sebagai mana visi Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui tingkat perkembangan pembangunan terhadap program dan pembangunan kecamatan dilakukan penilaian evaluasi pembangunan dengan mengadakan penilaian evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan tahun 2019. Mengingat pemberdayaan dan pembangunan kecamatan mempunyai program dan kegiatan yang bermanfaat sehingga permasalahan yang kaitannya dengan masyarakat dapat teratasi.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngampilan menentukan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan dengan menggunakan IKM yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan standar pelayanan menggunakan peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis pelayanan seperti kependudukan, perijinan, legalisasi, dan lain-lain.

Kecamatan Ngampilan sebagai salah satu perangkat daerah yang *core bussines*-nya pelayanan juga mengukur kinerja program melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah dilakukan. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Kecamatan Ngampilan mendasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial. Kewenangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngampilan adalah berupa pelayanan legalisasi, ijin mendirikan bangun bangunan tertentu, ijin pedagang kaki lima, ijin pondokan. Pelayanan kependudukan bersifat tugas perbantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan yang dihadapi dalam mengadakan pelayanan di Kecamatan Ngampilan selama ini lebih pada bersifat umum seperti, kurangnya SDM, SDM yang belum sesuai yang diharapkan, minimnya sarana pelayanan serta gedung kantor yang belum representatif. Disamping itu hambatan yang bersifat struktural adalah masih adanya duplikasi kewenangan atau ketidakjelasan kewenangan, hal ini dikarenakan belum adanya standar operasional yang bersifat komprehensif. Pada jenis pelayanan tertentu Kecamatan diberikan kewenangan untuk mengkoordinasi, memfasilitasi, merekomendasi bahkan memberikan kajian sosial, namun belum ada standar yang menjadi petunjuk pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan terjadi duplikasi atau terkadang kekosongan kewenangan.

Permasalahan di atas akan berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan dengan adanya duplikasi atau kekosongan kewenangan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dan menyebabkan ketidakjelasan dalam mekanisme pelayanan. Dengan adanya persepsi tersebut berakibat pula pada kurangnya kepercayaan dan partisipasi dari masyarakat yang menjadi konsumen pelayanan dan masyarakat umum lainnya. Jika ini dibiarkan maka akan menjadi permasalahan yang serius khususnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring dan sejalan perkembangan masyarakat, baik yang bersifat regional, nasional bahkan global. Dengan adanya perkembangan tersebut pemerintah seharusnya terus konsisten berusaha mengadakan perubahan seiring perkembangan yang ada. Namun perkembangan jangan sampai meninggalkan norma aturan yang telah ada sehingga konsistensi, keberlanjutan norma tersebut dapat terjaga. Selain itu tantangan dalam memberikan pelayanan akan terus meningkat seiring dengan

kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

Dengan adanya tantangan tersebut, maka sebuah Perangkat Daerah juga mempunyai peluang yang harus dimanfaatkan, sehingga pemecahan masalah atau kesenjangan tersebut dapat diatasi. Peluang yang ada antara lain pada saat ini partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta cukup tinggi sehingga sangat berpeluang untuk menerima regulasi yang diterapkan. Di samping itu sistem yang telah ada di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup mampu untuk menciptakan sistem pelayanan yang prima. Sistem yang baik ini dibuktikan dengan didapatnya berbagai penghargaan dari lembaga pemerintah maupun swasta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta di berbagai bidang.

Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain harus ada SOP yang komprehensif yang bersifat lintas Perangkat Daerah pada setiap kewenangan yang ada yang akan mengatur ketugasan semua pihak, serta adanya standar pelayanan publik (SPP), kepatuhan setiap Perangkat Daerah untuk merencanakan sebuah program yang sesuai dengan perencanaan yang bersifat umum. Disamping itu seharusnya ada mekanisme regulator yang berwenang untuk menyatakan sebuah program layak untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berwenang menguji apakah program tersebut layak sesuai perencanaan yang bersifat umum benar-benar terlaksana. Apabila kegiatan bersifat urusan bersama atau lintas Perangkat Daerah, diperlukan regulator yang bisa mengatur agar terbangun program yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

Prioritas pembangunan di Kecamatan Ngampilan mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
- b. Pendidikan
- c. Kesehatan
- d. Penanggulangan Kemiskinan
- e. Ketahanan pangan
- f. Ekonomi kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan
- g. Pariwisata berbasis budaya
- h. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif
- i. Sarana Prasarana Infrastruktur perkotaan
- j. Lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana termasuk pandemi covid 19

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Apabila rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan, aspirasi serta kemampuan APBD maka rancangan awal dapat langsung menjadi rancangan kerja SKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 ini mengacu pada pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan berbagai penyempurnaan disesuaikan dengan kebutuhan riil dan juga berpedoman pada Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dan Standar Belanja tahun 2019. Pada dasarnya untuk program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 3 Tahun 2015 tentang Keuangan Negara serta turunan peraturan dibawahnya, mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dilakukan melalui Musyawarah dari tingkat kelurahan, kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Dan kemudian usulan diteruskan ke tingkat Kota Yogyakarta. Hasil akhir dari pelaksanaan musyawarah tahunan adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta. Pada tahapan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan yang berbasis partisipatif masyarakat mendapatkan perhatian lebih, sebab pembahasan di tingkat Kelurahan biasanya akan menentukan kualitas usulan kewilayahan. Usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2021 disesuaikan dengan Pagu Indikatif Kewilayahan OPD Kecamatan pada tahun 2020 dan dana kelurahan bersumber dari DAU tambahan masing-masing sebesar Rp.350.000.000,- yaitu sebagai berikut : Kelurahan Ngampilan - Rp. 350.000.000,- Kelurahan Notoprajan - Rp. 350.000.000,-.

Melihat dari usulan serta ketersediaan anggaran khususnya dana yang bersumber dari OPD Kecamatan tentu ada ketimpangan antara usulan dengan dana yang tersedia berdasar pagu indikatif Kecamatan Ngampilan, maka untuk mengatasi hal tersebut dilakukan skala prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan dengan berpedoman pada kebutuhan darurat dan mendesak

terutama dari sisi kemanusiaan serta menyangkut kehidupan orang lebih banyak dalam pemanfaatannya. OPD Kecamatan juga berusaha menyatukan kegiatan duplikasi terutama pembangunan kewilayahan antara PPTK Kecamatan dengan PPTK Kelurahan. Program Kegiatan yang pada akhirnya dapat dianggarkan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui khususnya stake holder Kecamatan dan LPMK di masing-masing Kelurahan.

Kemudian terkait pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta ada beberapa hal yang menjadi pokok pikiran dewan dan perlu tindak lanjut oleh kemantren dalam perencanaan tahun 2021. Pokok-pokok pikiran dewan yang terkait dengan kemantren dan tindak lanjut dari pikir dewan tersebut juga diakomodir dalam perencanaan tahun 2021 dengan mempertimbangkan skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana kerja Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada rencana kerja daerah, yang tentu saja menindaklanjuti rencana kerja yang bersifat nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga sesuai dengan pelimpahan kewenangan-kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Praja. Begitu pula dengan Program yang direncanakan juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kebijakan nasional Kementerian Dalam Negeri memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kemantren, telaah sasaran dari Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa

Kemantren Ngampilan memiliki fungsi untuk pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kemantren Ngampilan. Hal ini sangat berkaitan dengan upaya menjamin stabilitas keamanan dan penciptaan suasana kondusif dalam rangka mengantisipasi timbulnya gejolak berkaitan dengan isu SARA (Suku, Agama dan Ras) yang rawan terjadi. Beberapa hal yang dilakukan Kemantren Ngampilan untuk mendukung sasaran ini :

- a. Menumbuhkan kesadaran bela negara dikalangan generasi muda dengan pembinaan generasi muda dan karang taruna.
- b. Memanfaatkan potensi masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban wilayah agar tidak timbul upaya disintegrasi bangsa.
- c. Melakukan mediasi warga untuk meminimalisir dan menangani konflik yang terjadi di wilayah yang berkaitan dengan politik dan sosial budaya/kultur.
- d. Melakukan monitoring dan pengamanan wilayah secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban.

2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu indikator sasaran ini adalah tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemantren Ngampilan memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan umum kepada masyarakat, berkewajiban menyelenggarakan tata kelola pemerintahan sesuai perundang-undangan. Dalam rangka mendukung sasaran ini Kemantren Ngampilan melakukan upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada penciptaan *Good government* dan *Good Governance* yang mengedepankan kepastian prosedur, layanan,

pembiayaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kemantren Ngampilan.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Beberapa indikator dari sasaran ini adalah penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai Standar Peningkatan Mutu (SPM), penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM dan persentase penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Kemantren Ngampilan sebagai penyelenggara layanan masyarakat sangat berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan sasaran ini selaras dengan misi 1 Walikota Yogyakarta yang berupaya menumbuhkan keberdayaan warga masyarakat. Kemantren Ngampilan merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung misi ini sehingga upaya yang dilakukan juga selaras dengan sasaran 4 Kemendagri. Meskipun demikian untuk bidang ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran hanya sebagai *supporting unit* dari Dinas Ketertiban, Dinas Kebakaran dan BPBD Kota Yogyakarta.

4. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

Kemantren Ngampilan memiliki kewenangan dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat karena kelurahan merupakan bagian dari kecamatan. Dalam mendukung sasaran ini Kemantren Ngampilan melakukan beberapa langkah :

- 4.1. Melakukan pembinaan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
- 4.2. Melakukan monev pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
- 4.3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang SPP
- 4.4. Melakukan penilaian atau evaluasi terhadap perkembangan pembangunan kelurahan.

5. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.

Kemantren Ngampilan sebagai garda depan pelayanan administrasi kependudukan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan sasaran ini karena Kemantren Ngampilan menjadi penggerak bagi warga masyarakat untuk melakukan tertib administrasi kependudukan melalui perekaman KTP Elektronik. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan database kependudukan yang akurat. Kegiatan yang dilakukan Kemantren Ngampilan untuk mendukung sasaran ini adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat melalui tokoh

masyarakat dan memanfaatkan forum –forum pertemuan warga untuk memberikan informasi pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat dan pentingnya perekaman E-KTP sebagai *single identity* untuk pengurusan semua dokumen. Kemantren Ngampilan melakukan pelayanan perekaman E-KTP dan melakukan distribusi serta verifikasi data kependudukan, hal ini merupakan bagian dari fungsi Kemantren Ngampilan sebagai penyelenggara layanan umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kemantren Ngampilan memiliki keterkaitan langsung terhadap pencapaian kebijakan nasional dari Kementerian Dalam Negeri karena Kemantren Ngampilan memiliki kewenangan terhadap peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dan memiliki keterkaitan langsung terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan menjadi garda depan validasi dan akurasi data kependudukan. Kemantren Ngampilan juga menjadi pendukung untuk pencapaian sasaran dari Kementerian Dalam Negeri meskipun tidak secara langsung karena kewenangan yang ada di Kemantren Ngampilan bersifat parsial dan hanya mendukung output dari instansi teknis.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam proses perencanaan pembangunan rangka mempermudah dalam memahami renjana kerja berikut ini akan dirumuskan mulai dari visi sampai dengan sasaran.

3.2.1. Tujuan

“Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan”

3.2.2. Sasaran

“Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat”

3.2.3. Strategi

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Ngampilan

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan tahun 2021 terdiri dari 4 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan
 - c. Administrasi Umum

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Kemantren Ngampilan yang berisikan rencana pembangunan tahunan Kemantren Ngampilan untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan dan masyarakat. Perumusan nomenklatur program tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022.

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Kemantren Ngampilan ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Perencanaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 baik indikator sasaran maupun program, yang sinkron dengan rencana Perjanjian Kinerja tahun 2021. Usulan juga memperhatikan hal-hal strategis sesuai dengan ketugasan Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan. Rencana Kerja Kemantren Ngampilan ini terdiri dari 4 (empat) program yaitu antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk memperjelas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Tahun 2021 mulai dari program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat di tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kota Yogyakarta

Kemantren Ngampilan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						4,548,888,572	4,784,368,431		Sekretaris Kecamatan (Mantri Anom) Ngampilan	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										

			meningkat				Daerah										
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD			400	412				APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan											3,187,412,216	3,378,726,449	lanjutan			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN	12 Bulan	Dukungan terhadap administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,177,012,216	3,367,632,949		Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP			APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan				450	413,5		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP		APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Bahan pelaksanaan verifikasi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran			1,200,000	1,236,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP		APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Dokumen	Tercapainya administrasi keuangan yang baik	100%		900	927		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP		APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran			400	412		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP		APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2,500,000	2,575,000		Ka. sub Bag Keuangan, Aset dan PEP		APBD

X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		3,000,000	3,500,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,030,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Laporan Keuangan Akhir Tahun		950	1,000,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,351,076,356	1,394,929,982	baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Surat Masuk	1.200 surat	Tersediannya pelayanan Surat Menyurat		5,595,000	5,800,000		Ka Sub Bag Umum dan kepegawaian	APBD
							Surat Keluar	900 surat							
							Pengiriman Dokumen	20 dokumen							
							Materai	1500 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat				Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	68,280,000	70,500,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran rekening Air	12 bulan	-	100%					
							Pembayaran rekening Listrik	12 bulan	-	100%					

X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2,	12 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		4,800,000	5,100,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3	1 unit							
							Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	1 unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			operasional administrasi perkantoran	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		70,940,856	73,069,082		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning service Kecamatan, kelurahan dan rumah dinas	12 bulan	kuualitas kebersihan lingkungan meningkat	100%	129,000,000	132,870,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Retribusi Kebersihan	12 bulan							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Alat tulis kantor	119 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	37,255,000	39,850,000			APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Barang cetakan	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,000,000	41,200,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penggandaan /Fotocopy	98524 lembar	-	100%					
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	8,975,500	9,050,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Bahan komputer/printer	7 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	120,000,000	125,000,000			Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Bahan peralatan dan perlengkapan kantor	38 jenis	-	100%						
							belanja Modal Laptop	1 unit	Kelurahan Ngampilan:	100%						
							belanja Modal LCD	2 unit								
							Belanja Modal TV untuk Ruang Pelayanan	1 unit								
							Belanja Modal Kipas tembok (Wall Fan)	4 unit								
							Belanja Modal Meja Knap	1 unit								
							Belanja Modal Kipas Angin Besar	2 unit	Kelurahan Notoprajan							
							Belanja Modal Kursi kerja putar	18 buah								
							Belanja Modal Meja komputer	1 buah								
							Belanja Modal printer	2 unit	Kecamatan Ngampilan							
							Belanja Modal Komputer	2 unit								
							Belanja Modal Microphone	2								
							Belanja Modal Meja kursi tamu	1 set								
							Belanja Modal meja kerja	2 buah								

X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			peralatan rumah tangga	40 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12,750,000	13,200,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Makanan dan minuman rapat	4950 os	Rapat koordinasi yang terselenggara	100%	95,800,000	98,880,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Makanan dan minuman harian umum	12 bulan	-	100%					
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Ngampilan dan Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Notoprajan dan Rumah Dinas Camat	4 gedung	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	370,000,000	381,100,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							pajak PBB	1 tahun							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Kendaraan roda 4	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67,930,000	69,967,900		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Kendaraan roda 2	12 unit							
							Kendaraan roda 3	1 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan Ngampilan dan Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Notoprajan dan Rumah Dinas Camat	4 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		291,000,000	299,730,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

							Jasa keamanan kecamatan dan kelurahan	12 bulan									
							Pemeliharaan taman	12 jenis									
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Pemeliharaan Komputer	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		28,750,000	29,612,500				Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan AC Split	7 unit									
							Pemeliharaan Mesin Ketik	3 unit									
							Pemeliharaan Printer	5 unit									
							Pemeliharaan laptop	3 unit									
							Pemeliharaan pompa air	4 unit									
							Pemeliharaan Mebelair	6 unit									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	84,15					834,842,372	859,887,644				Camat (Mantri Pamong Praja) Ngampilan	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										121,435,116	125,078,169	baru				
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	kemantren Ngampilan			Sosialisasi Pemilihan RT/RW	141 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	141 lembaga	121,435,116	125,078,169				Kasi Pemerintahan (Jawatan Praja)	APBD
							Pengukuhan Pelantikan RT dan RW	141 lembaga	Tertelaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-	141 lembaga							

									Kecamatan									
									Koordinasi RT dan RW	141 orang	Meningkatnya kapasitas RT/RW untuk melaksanakan tugasannya	141 orang						
									Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus Kampung	30 orang	Meningkatnya kapasitas pengurus kampung untuk melaksanakan tugasnya	30 orang						
									Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	30 ORANG								
									Monev Penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	1 dokumen		100%						
									Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen		100%						
									Penyusunan Monografi	1 dokumen								
									Penyusunan Profil Kelurahan Berbasis Data Potensi dan Perkembangan	1 dokumen		100%						
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum												128,045,000	131,886,350	Penyelenggaraan pembangunan dan ekonomi masyarakat			
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan					Gelar potensi UMKM	1 kali	Terselenggaranya koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%	128,045,000	131,886,350		Kasi Perekonomian dan Pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	APBD	
									Workshop manajemen UMKM	1 kali		100%						

							Pendampingan kegiatan pembangunan dan perekonomian	1 kali		100%						
							Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di kelurahan	1 dokumen		100%						
							Informasi program dan kegiatan pembangunan	1 dokumen		100%						
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Wilayah Terintegrasi	1 dokumen		100%						
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat										585,362,256	602,923,125	lanjutan			
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kecamatan Ngampilan			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan	Masyarakat memahami peraturan dan persyaratan perijinan dengan baik	100%	42,077,184	43,339,500		Kasi Pelayanan Umum (Jawatan Umum)	APBD	
							Sosialisasi Pelayanan Perizinan	30 orang	Masyarakat memahami peraturan dan persyaratan perijinan dengan baik	100%						
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan masyarakat yang memuaskan	100%	23,159,000	23,853,770		Kasi Pelayanan Umum (Jawatan Umum)	APBD	
							PATEN	12 Bulan		100%						
							Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	50 orang		100%						

7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang diimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Pelaksanaan HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK Kemantren Ngampilan (Lomba administrasi PKK dll)	200 orang	Meningkatkan pemahaman TP PKK dalam melaksanakan program PKK	100%	520,126,072	535,729,855		Kasi Kesejahteraan Masyarakat (Jawatan Sosial)	APBD
							Gebyar PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Kemantren Ngampilan - Pentas Seni dan Lomba lomba	300 orang	Membangun kreativitas anak PAUD	100%					
							Pembinaan HATINYA (Halaman Asri Teratur Indah Nyaman) PKK Kemantren Ngampilan	100 orang	Pengelolaan pekarangan/halaman rumah agar lebih bermanfaat dan indah	100%					
							Workshop Teknik Bercerita Kemantren Ngampilan	35 orang	Meningkatkan kemampuan bercerita	100%					
							Workshop Himpaudi (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini) Kemantren Ngampilan	85 orang	Memantapkan dalam berorganisasi	100%					
							Rakordasi Forum Kelompok BK (Bimbingan Konseling) Kemantren Ngampilan	40 orang	Tertib administrasi	100%					
							Workshop PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) Kemantren Ngampilan	60 orang	Memberikan pengertian pada remaja tentang kesadaran perencanaan berkeluarga	100%					
							Lomba permainan tradisional (teklek tando, lari bathok, lari karung & egrang bambu) Kemantren	4 lomba	Melestarikan warisan budaya daerah	100%					

							Ngampilan		dalam Keluarga										
							Workshop Pemberdayaan Sosial Kemantren Ngampilan	50 orang	Memotivasi Anggota Kelompok PKH (Program Keluarga Harapan) & BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk bisa terentaskan dari kemiskinan dan mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah keluar dari Peserta PKH	100%									
							Rapat Koordinasi Lembaga Sosial Tingkat Kemantren Ngampilan	30 orang	Membangun Kesepahaman dan koordinasi sehingga terjalin kerjasama yang baik, efektif dan secara bersama2	100%									
							Rapat Koordinasi (BPNT) Bantuan Pangan Non Tunai Kemantren Ngampilan	30 orang	Membangun kesepahaman, mendeteksi dini persoalan-persoalan yang muncul dalam program BPNT	100%									
							Rapat Koordinasi Pekerja Sosial Masyarakat Kemantren Ngampilan	20 orang	Membangun Kesepahaman dan koordinasi sehingga terjalin kerjasama yang baik, efektif dan secara bersama2	100%									
							MTQ Kemantren Ngampilan	14 Lomba	Memelihara, mengembangkan, dan/atau meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan/atau penyebaran al-Qur'an dan al-Hadits	100%									
							Festival Takbir Keliling Kemantren Ngampilan	150 orang	Membangkitkan semangat dalam mengerjakan	100%									

								kebaikan.									
								HUT Kemerdekaan RI Kemantren Ngampilan	1 kegiatan	Membangkitkan semangat dalam memberdayakan masyarakat	100%						
								Operasional pengelolaan pemberdayaan Masyarakat	12 bulan	Memperlancar pengelolaan pemberdayaan masyarakat	100%						
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Angka swadaya Murni	Rp.665.460.000,-					1,549,954,500	1,596,453,135				Camat (Mantri Pamong Praja) Ngampilan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											1,549,954,500	1,596,453,135	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kelurahan Notoprajan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kelurahan Notoprajan				Pemeliharaan Konblok Kp.serangan dan Notoprajan	2 Lokasi	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Notoprajan	100%	486,000,000	500,580,000			Lurah Notoprajan	APBD
								SAH kampung Serangan	6 Lokasi	Kelancaran aliran air hujan	100%						
								Pengadaan penyangga bak air	1 Lokasi	Penunjang Fasilitas	100%						
								Pengadaan meja untuk Yandu	1 Lokasi	Membantu pelayanan yandu	100%						
								Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum (Rehab Balai RW Serangan, Notoprajan dan Suronatan Pemel Ruang publik RW 3 Serangan dan RW 6	5 Lokasi	Kualitas Fasilitas Umum Meningkat	100%						

							Notoprajan)										
							Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas	2 Dokumen	Pendukung pembangunan fisik secara optimal	100%							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kelurahan Ngampilan			Pemeliharaan Konblok Kelurahan Ngampilan (kampung Ngampilan, Kampung Pathuk, Kampung Ngadiwinatan dan Kampung Purwodiningratan)	1782 m	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Ngampilan	100%	431,940,000	444,898,200			Lurah Ngampilan	APBD	
							SPAH di Kampung Pathuk	18 Titik	Kesehatan dan kenyamanan warga masyarakat	100%							
							Pembuatan lorong taman dan Tamanisasi kampung Purwodinngratan	4 RT	Lingkungan Asri	100%							
							Pembuatan Jaringan Air bersih Kampung Pathuk	1 lokasi	Kesehatan dan kenyamanan warga masyarakat	100%							
							Besi Penutup Selokan	2 lokasi	Akses aman dan nyaman	100%							
							Pembuatan Garasi Roda 3 Damkar Kampung Ngadiwinatan	12,5 m	Penyimpanan Inventaris	100%							
							Pembuatan Pojok Baca (Taman Bacaan)	1 Lokasi	Meningkatkan Minat baca masyarakat	100%							
							Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan	2 Dokumen	Pendukung pembangunan Fisik Secara Optimal	100%							

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kelurahan Notoprajan			Festival Bregodo wirogending Kelurahan Notoprajan	500 orang	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Notoprajan	100%	250,984,000	258,513,520		Lurah Notoprajan	APBD
							Pelatihan memasak kue/kudapan Kelurahan Notoprajan	20 orang	Peningkatan ekonomi	100%					
							Pelatihan membuat batik ekoprint Kelurahan Notoprajan	20 orang	Peningkatan ekonomi	100%					
							Pelatihan Budidaya Bunga Anggrek Kelurahan Notoprajan	20 orang	Peningkatan ekonomi	100%					
							Pelatihan MC Bahasa Jawa Kelurahan Notoprajan	25 orang	Peningkatan Keterampilan	100%					
							Pelatihan Sibori Pemula Kelurahan Notoprajan	20 orang	Penambahan income warga	100%					
							Pelatihan shibori lanjutan Kelurahan Notoprajan	20 orang	Penambahan income warga	100%					
							Pelatihan manajemen pemasaran shibori Kelurahan Notoprajan	20 orang	Penambahan income warga	100%					
							Pelatihan Urban Farming Kelurahan Notoprajan	20 orang	Penghijauan yang produktif	100%					
							Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian dan Pemasaran Kelurahan Notoprajan	20 orang	Bertambahnya nilai produk hasil pertanian	100%					

							Penyusunan Rapot Kemiskinan Kelurahan Notoprajan	200 orang	Mengurangi angka kemiskinan	100%						
							Pembinaan keluarga penyandang disabilitas Kelurahan Notoprajan	40 orang	Memberikan kiat dan cara mengasuh serta mendidik penyandang difabel	100%						
							Lomba, Gelar seni, pojok dongeng Kelurahan Notoprajan	40 orang	Mengembangkan budaya literasi pada anak anak	100%						
							Pelatihan Pengembangan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) Kelurahan Notoprajan	20 orang	Pemahaman warga	100%						
							Intervensi Keluarga Rentan Afiriasi Kelurahan Notoprajan	1 Kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan	100%						
							Operasional RT,RW,Kampung dan LPMK (Rakor,Fotocopy, Paket Data) Kelurahan Notoprajan	4 lembaga	Mendukung kelancaran hubungan dan pelayanan masyarakat	100%						
							Lomba lomba Kelurahan Notoprajan	1 Kegiatan	Tersedianya anggaran untuk lomba	100%						
							PJU Kelurahan Notoprajan	50 Titik	Tersedianya penerangan jalan	100%						
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kelurahan Ngampilan			Pelatihan Asmantoga dan Akupreasure Kelurahan Ngampilan	40 orang	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ngampilan	100%	381,030,500	392,461,415			Lurah Ngampilan	APBD

							Pembinaan Olah Raga Kelurahan Ngampilan	50 orang	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	100%						
							Operasional RT,RW,Kampung dan LPMK Kelurahan Ngampilan	4 Kegiatan	Mendukung kelancaran pelayanan dan hubungan masyarakat	100%						
							Lomba - lomba Kelurahan Ngampilan	1 Kegiatan	Tersedianya anggaran untuk Lomba	100%						
							PJU Kelurahan Ngampilan	50 Titik	Tersedianya penerangan jalan	100%						
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah pelanggaran Perda	72 kali					293,281,272	302,079,710			Camat (Mantri Pamong Praja) Ngampilan	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										201,281,272	207,319,710	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan			
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Sosialisasi Pondokan (Sapa anak kos)	60 orang	Meningkatnya tertib izin dan penyelenggaraan pondokan	100%	201,281,272	207,319,710			Kasi ketenteraman dan ketertiban (Jawatan Keamanan)	APBD
							Sosialisasi Pembinaan & Penataan PKL terkait Penegakan perda	60 orang	Meningkatkan ketertiban dan kesadaran PKL	100%						
							Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB-KTB)	60 orang	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengurangan Resiko Bencana	100%						
							Sosialisasi Mitigasi Bencana (Tagana/PMI)	60 orang	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi Resiko	100%						

								Bencana									
								Peningkatan Kapasitas Anggota PMI	60 orang	Meningkatkan kemampuan anggota PMI Kecamatan	100%						
								Peningkatan Kapasitas RW/Kampung/LPMK	60 orang	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah	100%						
								Pelatihan Pengamanan Wilayah	60 orang	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah	100%						
								Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	60 orang	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%						
								Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	60 orang	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%						
								Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	26 Tabung APAR	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalamantisipasi kebakaran ringan	100%						
								Operasional Ketentraman dan ketertiban	12 bulan	Pengelolaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%						
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada											92,000,000	94,760,000	lanjutan			
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan				Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkopimka)	12 bulan	Terjalinnnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	12 bulan	92,000,000	94,760,000		Kasi Ketentraman dan Ketertiban (Jawatan Keamanan)	APBD	
								Operasional Pengamanan masyarakat	12 bulan	Terciptanya kondisi ketentraman dan Ketertiban masyarakat	100%						

							Operasi Ketertiban Masyarakat	12 bulan	Terciptanya kondisi ketentraman dan Ketertiban masyarakat	100%					
Total											7,226,966,716	7,542,788,920			

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain; kecermatan dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Pada proses pelaksanaan ini perlu ketelitian dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja ini berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Dan hal yang paling utama adalah *outcomes* yang dihasilkan mampu memberikan kemanfaatn dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Kemantren Ngampilan Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2021.